



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019 - 2020
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kemenkeu, Kemnaker, dan Kemenpan RB dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Hari, Tanggal : Selasa, 20 Agustus 2019
Pukul : 14.22 WIB - 15.59 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Acara : Masukan terhadap RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara
Hadir : **PIMPINAN:**
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)
2. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F-PDI Perjuangan)
3. Ir. H. Satya Widya Yudha, M.Sc. (F-PG)
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)
5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P., M.P.P. (F-PAN)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIPol.
8. Charles Honoris
9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
10. Junico BP Siahaan
11. Yadi Srimulyadi
12. Drs. Ahmad Basarah, MH

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

13. Meutya Viada Hafid
14. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
15. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
16. Bambang Atmanto Wiyogo, S.E.
17. Venny Devianti, S. Sos.
18. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.
19. Dr. Jerry Sambuaga

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

20. H. Ahmad Muzani

21. Martin Hutabarat
22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
23. Rachel Maryam Sayidina
24. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
27. H. Darizal Basir
28. Ir. Hari Kartana, M.M.
29. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

30. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
31. Ir. Alimin Abdullah
32. Budi Youyastri
33. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

34. Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si.
35. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
36. Arvin Hakim Thoha
37. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

38. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
39. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

40. Moh. Arwani Thomafi
41. Dra. Hj. Lena Maryana
42. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

43. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A.
44. Prananda Surya Paloh
45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra
46. H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)

47. Drs. Timbul P. Manurung

- Anggota yang Izin : 1. Andreas Hugo Pareira (F-PDIP)
 2. Elnino M. Husein Mohi, S.T., M.Si. (F-GERINDRA)
 3. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. (F-PD)
 4. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
- Undangan : 1. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Didik Kusnaini, S.E., M.P.P.;
 2. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Encep Sudarwan;
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan SDM Kementerian Ketenagakerjaan RI, Drs. Aris Wahyudi, M.Si.;

4. Direktur Kelembagaan Dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Drs. Aswansyah;
5. Kabag Penelaahan Hukum dan Evaluasi Konvensi Internasional Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sutarwan, S.E.;
6. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Drs. Teguh Widjinarko, MPA.;
7. Direktur Eksekutif APINDO, Danang Girindra Wardana; beserta jajarannya.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.):

Selamat datang kami ucapkan kepada para pejabat dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kemenaker dan Apindo.

Yang sudah siap hadir untuk kita melaksanakan sama-sama RDP dan RDPU dalam rangka mendapatkan masukan kita akan bikin Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Jadi maklum kita baru selesai Rapat Paripurna jadi orangnya pada kabur-kabur cari makan, tapi nanti sambil menunggu mereka datang, kita serahkan saja kepada Bapak sekalian untuk kita mulai RDP ini sambil menunggu teman-teman. Jadi Bapak-bapak sekalian, sebagaimana yang kita harapkan, Sumber Daya Nasional ini harus kita bikin undang-undangnya untuk bisa nanti membuat undang-undang yang lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Nasional seperti Undang-undang Bela Negara, pasti kesana perginya. Oleh karenanya sebelum kita memulai RDP ini, kita sudah menerima surat dari Presiden Nomor R29Presiden/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal, telah menyampaikan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara dan PSDN. Oleh karenanya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak-bapak beserta rombongan sambil menunggu orang-orang Komisi I datang. Kami tawarkan biasanya ini kita melaksanakan terbuka atau tertutup, melihat urgensinya masalah yang kita bahas. Tapi kalau ini baru masukan saja, kita harapkan untuk terbuka aja. Setuju, Pak? Oke, (RDP) Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI dengan Kemenkeu, Kemenpan RB, Kemenakertrans dan Apindo, Selasa 20 Agustus 2018 kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.22 WIB)

Ini rodho angel Kemenakertransnya ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, memang ditugaskan Menteri Pertahanan untuk dan Menteri Kumham untuk membahas bersama-sama DPR RI masalah PSDN ini. Selanjutnya Surat Presiden tersebut sudah dibacakan dalam Rapat Paripurna dan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus telah memutuskan menugaskan DPR untuk Komisi I membahas RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam Rapat Intern Komisi I juga pada tanggal 19 Agustus telah memutuskan untuk menjadwalkan RUU untuk Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Pertahanan Negara bersama-sama dengan Pemerintah. Oleh karena itu sambil menunggu teman-teman kita lanjutkan saja, kita mohon untuk Bapak-bapak pejabat dari Kemenkeu dulu, Kementerian Keuangan, ya Kementerian Keuangan ya? Untuk menyampaikan paparan lebih dulu, nanti berturut-turut, silakan yang mewakili siapa nanti dengan Kementerian Keuangan nanti dari Kementerian PAN dan RB, kemudian yang ketiga dari Kemenakertrans, yang keempat dari Apindo. Nanti ada waktu, kita mungkin minta waktu untuk pendalaman, Pak, karena ada hal-hal yang perlu disampaikan atau tanggapan untuk bisa di sampaikan dalam RDP ini.

Kami silakan dari Kemenkeu dulu ya dari Pak Direktur Harmonisasi Peraturan Anggaran atau dari Pak Encep Sudarwan Direktur Barang Milik Negara, silakan Pak, nanti kita tanggapi bersama-sama.

DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI (DIDIK KUSNAINI, S.E., M.P.P.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon ijin, Bapak.

Saya Didik Kusnaini Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, kemudian dari Kementerian Keuangan juga ada Pak Encep Sudarwan, beliau adalah Direktur Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebelumnya mohon maaf, Bapak Pimpinan bahwa pada kesempatan siang hari ini kami tidak menyiapkan paparan secara khusus karena kemarin koordinasi dengan Kementerian Pertahanan, kita sifatnya masih diskusi umum dulu.

Terhadap Rancangan Undang-undang PSDN ini, Kementerian Keuangan mendukung penuh Pak, sebagaimana dengan surat yang disampaikan dalam Surat Presiden bahwa kita siap untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Memang dalam draft RUU, dalam RUU tersebut, ada beberapa hal yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Pertama, adalah dari sisi dukungan pendanaan, kemudian yang kedua adalah dari sisi pengelolaan barang milik negara dan yang ketiga, tentang perpajakan, insentif perpajakan. Setelah kami melakukan diskusi, dalam pembahasan nanti tentunya Pak, kami akan melakukan harmonisasi dengan undang-undang terkait misalnya kalau paket Undang-undang Keuangan Negara misalnya di Undang-undang 17, Undang-undang 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan juga tentang pertanggungjawaban. Sehingga harapan kita disamping memberikan dukungan terhadap nanti misalnya ada mobilisasi kemudian ada bagaimana mengelola Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, itu akuntabilitas tetap terjaga meskipun kondisinya dalam kondisi misalnya darurat dan sebagainya.

Kemudian kalau kita cermati satu persatu barangkali nanti yang terkait dengan barang milik negara bisa disampaikan Pak Encep. Tapi dari sisi pendanaan, secara normatif memang kita buka, Pak disini pendanaan baik dari APBN sebagai tulang punggungnya, kemudian kita buka juga peluang dari APBD sehingga apabila daerah ingin berpartisipasi kita terus memberikan ruang dan juga sumber-sumber lain yang sah. Sumber lain yang sah misalnya disini ada asosiasi pengusaha, ada filantropis dan sebagainya tetap kita beri ruang untuk memberikan dukungan. Tentu atur tata kelolanya.

Hal lain yang akan berdampak kepada Kementerian Keuangan kurang lebih ada 2 Pak, selain pendanaan acara umum tadi, yang pertama adalah pembangunan atau pembentukan komponen cadangan karena disini dari awal komponen cadangan dibentuk, dibina kemudian dikembalikan instansi asal dan termasuk pengaktifan. Posisi kami Pak, untuk komponen cadangan ini karena kalau kita berdiskusi dengan Bapak dan Ibu di Kementerian Pertahanan itu arahnya adalah membentuk komponen cadangan yang cukup kuat, maka barangkali nanti ini diatur secara umum di RUU ini yang detailnya untuk mencapai sasaran itu mencapai target misalnya jumlah atau kekuatan tertentu itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang nanti kita atur di PP jadi kita bisa melihat tahun demi tahun bisa membangun, bisa merekrut berapa sehingga sasaran akhir tadi terpenuhi.

Demikian juga dengan komponen pendukung Pak, ini barangkali yang nanti kita perlu secara kita dalam secara detail agar bisa harmonis dengan paket perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Kementerian Keuangan.

Barangkali dari pembuka kami itu dulu Bapak, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tidak ditambahi Pak Encep, ada? Silakan, Pak.

DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI (ENCEP SUDARWAN):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya Encep Sudarwan, Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan. Jadi pada prinsipnya kami mendukung apa yang ada di Undang-undang tentang Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini dengan prinsipnya dalam pemanfaatan BMN perlu memperhatikan peraturan-peraturan dalam BMN. Itu saja mungkin Pak, yang ingin disampaikan dari sini.

Terima kasih, Bapak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak.

Berarti dari Kementerian Keuangan sudah memberikan paparan. Kita lanjut tentu saja Pak, biar tidak ini. Kementerian sekarang PAN dan RB. Silakan Pak Teguh ya.

STAF AHLI BIDANG BUDAYA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI (DRS. TEGUH WIDJINARKO, MPA.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Pimpinan Rapat yang saya hormati dan Anggota-anggota Komisi I,

Pada dasarnya kami mendukung sekali upaya untuk menetapkan Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan. Ada beberapa hal yang terkait dengan Kementerian PAN dan RB disini Pak, dalam kaitan dengan Rancangan Undang-undang ini yaitu secara spesifik di Pasal 35 dan Pasal 42 kalau tidak salah, 42 terkait dengan komponen cadangan. Tetapi setelah kami pelajari RUU ini, kami berikan pandangan sebagai berikut, pertama, adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945 Pertahanan Negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang nomor 2, dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 disebutkan pada Pasal 4 bahwa ASN memiliki nilai-nilai dasar yang terkait dengan upaya mempertahankan keutuhan NKRI yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar 1045 serta Pemerintahan yang sah dan mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia.

(b)nya Pasal 10, disebutkan salah satu fungsi ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pada saat ini memang sudah diterapkan pelatihan dasar yang secara khusus memberikan materi tentang bela negara. Jadi sebenarnya kami sudah memberikan pelatihan dasar tentang bela negara di bagi calon-calon PNS sebelum diterima secara resmi menjadi PNS. Pelatihan dasar tentang bela negara ini tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran bela negara yang hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara.

Nomor 4, karena itu, pencantuman ASN sebagai salah satu komponen cadangan yang merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama tidak bertentangan dengan Undang-undang ASN. Pencantuman ASN sebagai komponen cadangan justru

memperkuat dasar hukum bagi fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Atas dasar tersebut kami mendukung sepenuhnya upaya penetapan RUU Undang-undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Pertahanan untuk ditetapkan.

Kami menyarankan mengenai keterlibatan ASN sebagai komponen cadangan diatur lebih lanjut melalui pengaturan yang sifatnya lebih teknis. Demikian Pak, pandangan kami dari Kementerian PAN dan RB. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Berarti PAN mendukung juga sepenuhnya ya Pak ya. Pak ini tidak datang, Pak Trisno, sendiri aja? Oh ada di belakang ya. Oke kalau demikian kita lanjutkan kepada Kemenakertrans ya, silakan siapa yang dulu, Pak Aris ya, *monggo* Pak Aris, silakan. Pak Aris Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Pak ya.

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SDM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (DRS. ARIS WAHYUDI, M.SI.):

Bismillahirrahmanhirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Pimpinan.

Ijinkan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan memberikan pandangan terkait dengan inisiasi pembahasan RUU Pengelolaan Sumber Daya untuk pertahanan. Jadi ijin koreksi sedikit Pak Pimpinan, tanpa trans Pak, jadi Kementerian Ketenagakerjaan. Transnya sudah di Kalibata, ditinggal di Kalibata, Pak.

Terima kasih, kami juga dilibatkan dalam untuk memberikan pandangan terkait dengan inisiatif penyusunan RUU pengelolaan Sumber Daya untuk Pertahanan. Kalau kita melihat dari sisi naskah akademik yang diberikan, prinsipnya sesuai dengan Undang-undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang ini memberikan back up penuh untuk adanya pengecualian atau untuk adanya perlakuan khusus kepada pekerja atau buruh ketika negara memanggil dalam konteks tugas-tugas atau kewajiban terhadap negara. Jadi sudah ada slot, sudah ada klausul yang memberikan satu privilege. Demikian juga kaitannya dengan bagaimana kalau para pihak utamanya dari pengusaha tidak mengizinkan, misalnya dilakukan PHK itu dalam penjelasan itu dikatakan batal demi hukum dan tetap harus dilanjutkan hubungan kerjanya. Demikian juga untuk kaitannya dengan hak-hak dia dalam jaminan sosial sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jadi kaitannya dengan pekerja dari sisi hak-haknya terlindungi ketika negara membutuhkan untuk kaitannya dalam hal ini misalnya bela negara.

Kemudian yang kedua, ini menurut saya menjadi penting juga resources dari sisi jumlah, angkatan kerja kita posisi terakhir adalah lebih kurang 136 juta. Siapa itu angkatan kerja, angkatan kerja adalah mereka yang sudah bekerja dan yang aktif mencari pekerjaan. Jadi dari sisi ini potensi penggerak dalam hal keadaan menjaga keamanan negara, atau dalam konteks pertahanan ini menurut saya menjadi sangat potensial untuk digerakan. Hanya yang perlu dipertimbangkan ataupun di waspadi di era saat ini adalah model atau tata laksana pelaksanaan bela negara itu sendiri sehingga nanti tidak ada kesan militerisasi atau kesan yang sifatnya fisik karena mau tidak mau, suka tidak suka begitu hal-hal terkait dengan militer biasanya olah raga dulu dari sisi fisiknya harus kuat dulu dan ini juga tadi dari Kementerian PAN kami sejak kalau dalam konteks Kementerian Ketenagakerjaan secara personal di ASN atau PNS Kementerian Ketenagakerjaan dari jaman Pak Menteri Nakernya Pak Sudomo, kita sudah dikenalkan calon PNS itu salah satu materi diklat prajabnya adalah satu minggu itu di gembelng tentang fisik,

mental dan disiplin yang kita ini diceburin di biasanya di barak-barak jadi kita sudah biasa seminggu makan pakai tomprengan di barak militer. Kalau misalnya kami dikampung lembur, di dekat Taman Mini itu yang dimana itu yang sebelum Pasar Rebo itu sebelum Ciracas itu jadi kami di gembeleng untuk itu dan kami merasakan bedanya sebelum kami di treatment dalam konteks fisik, mental disiplin itu dengan sebelumnya.

Jadi ini penting untuk kita berikan bekal, mental kepada anak-anak kita apalagi ini kedepan era milenial ini jadi menyangkut dengan fisik, mental dan disiplin nasionalisme itu tetap harus ada. Kami juga mempraktekan itu untuk anak-anak kita yang mau berangkat magang ke Jepang, konteks magang 3 bahkan sekarang ini mau di eksen ke 5 tahun juga kita berikan pembekalan tentang kewiraan atau dari TNI untuk memberikan nasionalisme. Ini juga untuk meminimalisasi begitu anak-anak kita ketika di luar negeri itu mendapatkan tawaran-tawaran dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk keluar dari program. Dengan diberikan bekal itu kita mendapatkan respon dari user di Jepang misalnya, bahwa mereka lebih baik, lebih disiplin, lebih semangat untuk mengikuti program itu tanpa terpengaruh dengan ajakan-ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi menurut saya ini penting untuk kita sampaikan bahwa memang masalah pertahanan termasuk juga keamanan ini menjadi harus dilibatkan semaksimal mungkin potensi bangsa yang ada ini untuk bersama-sama bertanggungjawab.

Itu saja secara umum pandangan kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menyangkut dengan inisiatif RUU Pengelolaan Sumber Daya untuk Pertahanan ini. Prinsipnya kami mendukung karena ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar apalagi era kedepan. Hanya tinggal bagaimana cara atau mekanisme agar tujuan kita nasionalisme ini bisa terjaga tanpa kekhawatiran dari berbagai pihak yang tadi saya gunakan misalnya militerisasi itu saja.

Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak Aris.

Mungkin perlu tambahan Pak Aswansyah sama Pak Sutarwan kalau ada. Silakan, Pak.

**DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA HUBUNGAN INDUSTRIAL (KKHI)
DIREKTORAT JENDERAL PHI DAN JAMSOS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
(DRS. ASWANSYAH):**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Kami akan menambahkan sedikit saja Bapak ya memang benar bahwa didalam Undang-undang 13 Pasal 143 itu huruf (b) itu ya pekerja melaksanakan tugas negara itu tidak boleh di PHK dan disamping itu juga ini dikuatkan dengan Undang-undang 21/2002 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh dimana Pasal 2 itu bahwa Serikat Perkerja Serikat Buruh, Federasi dan Kofederasi Serikat Pekerja Serikat Buruh menerima Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Ini kalau memang Rancangan Undang-undang ini kita inikan memang pas ini ya, jadi begini, memang kalau kita lihat dinamika Serikat Pekerja Serikat Buruh, ini kan mereka dapat berafiliasi ke Serikat Perkerja luar negeri. Kalau hal ini kita tidak tanamkan ajaran-ajaran ideologi Pancasila ini nanti yang dikhawatirkan takut terpengaruh dengan ideologi-ideologi dari negara-negara lain yang mereka berafiliasi ke Serikat Perkerja luar negeri. Ini saya rasa kami sangat mendukung hal ini kalau memang Rancangan Undang-undang ini kita bahas dan kita harmonisasikan sehingga

kedepannya untuk menjaga stabilitas negara yang mana Serikat Pekerja Serikat Buruh ini jangan dipengaruhi oleh dunia-dunia luar. Ini saya rasa bisa kita tanamkan bahwa mereka cinta akan Indonesia. Saya rasa itu Bapak, tambahan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Arwansyah. Mungkin Pak Sutarwan masih ada penambahan biar lengkap, Pak.

KABAG PENELAAHAN HUKUM DAN EVALUASI KONVENSI INTERNASIONAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (SUTARWAN, S.E.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang terhormat para Anggota Komisi I,

Menambahkan sedikit Pak, yang terkait langsung dengan konsepsi RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ini memang di Undang-undang Nomor 13 itu adalah Pasal 153 yang terkait langsung Pak, dimana didalam undang-undang ini memberikan prioritas utama bagi pekerja dalam rangka melaksanakan kewajiban terhadap negara yang tentunya yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi secara regulasi Pak, bahwa Undang-undang 13 ini mengamanatkan kepada Peraturan Perundang-undangan lain untuk menjabarkan lebih lanjut apa itu kewajiban-kewajiban terhadap negara. Jadi artinya secara sinkron ini memang sudah saya rasa sudah sangat sinkron untuk pengaturan tentang kewajiban ini dan hak-hak pekerja selama melaksanakan terhadap kewajiban terhadap negara itu tetap dilindungi Pak, hak-hak pekerja. Termasuk juga jaminan sosial pekerja. Saya rasa itu, Pak. Jadi apa yang akan diatur nanti didalam RUU ini tentunya juga bisa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang 13. Karena di Undang-undang 13 khususnya di Pasal 153 ini hanya mengatur secara umum Pak, apa sih itu kewajiban memenuhi kewajiban terhadap negara.

Kalau seandainya nanti di dalam konsepsi RUU ini mengatur lebih lanjut agar nantinya pekerja juga dan pengusaha akan persis tahu oh ini yang dimaksud dengan kewajiban terhadap negara. Saya rasa demikian Pak yang saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Sutarwan dari Kemenakertrans. Mudah-mudahan jadi bahan kita. Kita lanjutkan saja sama Bapak-bapak dari Apindo. Silakan Pak, siapa yang duluan, silakan apa Pak Sutrisno, Pak Girindrawardana Danang.

Pak Danang ya, oke silakan, Pak.

DIREKTUR EKSEKUTIF APINDO (DANANG GIRINDRA WARDANA):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.
Saya Danang Girindrawardana, Bapak. Saya bertugas untuk.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Saya pikir tadi rekan Gerindra Pak.

DIREKTUR EKSEKUTIF APINDO (DANANG GIRINDRA WARDANA):

Saya Danang Girindrawardana dari Apindo. Kebetulan saya ditugasi menjadi Direktur Eksekutif Apindo dan Ketua Umum Kami Bapak Haryadi Sukamdani menyampaikan permohonan maaf, tidak bisa hadir diruangan ini karena kesempatan dalam acara yang sama. Tapi pada intinya kami di Apindo menyambut baik adanya RUU Sumber Daya Nasional ini tentu kaitannya dengan apa yang menjadi konsen kami ada dibidang investasi dan ketenagakerjaan karena segala banyak setelah kita pelajari dari naskah akademik dan draft dari Rancangan Undang-undang tersebut memang hampir 50% dari konsen tentang Undang-undang ini menyangkut kurang lebih 136 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia itu sudah hampir separuh penduduk Indonesia dalam usia dewasa. Jadi memang wajar sekiranya terima kasih sekali Apindo diberikan kesempatan untuk ikut memberikan sudut pandanginya terkait dengan RUU ini, Bapak.

Bapak, pada intinya ada beberapa hal yang kami perlu haturkan didalam kesempatan ini mohon ijin kami tidak memberikan paparan tetapi kami bisa bacakan sedikit. Bahwa pertama, mengenai tantangan-tantangan yang kiranya nanti perlu kita pertimbangkan dalam melengkapi draft dari RUU ini supaya lebih operasional. Yang pertama, adalah memang dalam tantangan di jumlah pekerja formal karena kalau menyangkut Sumber Daya Manusia terdapat 3 komponen besar yang Bapak sudah masukan ke dalam draft tersebut yaitu tenaga kerja dalam artinya bekerja di sistem pendidikan nasionalnya dan masyarakat pada umumnya, didalam draft itu sudah disebutkan begitu. Dalam ranah kami, kami akan bicara menyoroti terkait dengan pekerja tersebut. Kita memahami bahwa ada yang disebut dengan pekerja formal dan pekerja informal. Kebetulan data di Februari 2019, jumlah pekerja angkata kerja kita itu tepat sekali Bapak tadi 136 juta, penduduk yang bekerja itu 129 juta. Dari 129 juta tersebut yang kerja informal itu 74 juta. Jadi yang ada didalam ranah yang perlu kita atur didalam Rancangan Undang-undang nanti kurang lebih di angka 63 juta kurang lebih, Pak karena yang pekerja non formal itu bisa jadi masuk kedalam ranah kelompk masyarakat. Jadi kurang lebih angka yang benar-benar masuk kedalam dunia kerja formal yang nanti akan melibatkan dunia usaha dalam pengaturan atau teknis menugaskan pegawainya untuk ikut ke dalam sistem pendidikan kewarganegaraan didalam ranah undang-undang ini, itu kurang lebih kita berbicara di angka 63 juta orang. Jumlah ini besar sekali, Pak, artinya dari 63 juga orang ini bisa terkait dengan puluhan ribu perusahaan yang mesti kita dalam satu mekanisme kontrol tertentu secara digital secara elektronik mestinya bisa kita jangkau nanti.

Bapak, Ibu, tentu memikirkan 63 juta ini juga kami memiliki harapan besar bahwa salah satu dari permasalahan residu-residu Pilkada atau Pemilu kemarin kan masalah-masalah radikalisasi dan polarisasi dukungan kepada Capres tertentu atau Cawapres tertentu pada waktu itu. Ini sebenarnya menurut kami memang agak mengganggu didalam proses kelancaran dan produktivitas di setiap perusahaan, Pak. Seperti kita ketahui federasi-federasi serikat pekerja pada dasarnya kemarin terpolarisasi dalam 2 kubu yang cukup besar. Disitu kemudian tertanam juga muncul isu-isu radikalisasi yang kebetulan juga terjadi dalam melibatkan di angkatan kerja yang bekerja di swasta ataupun di BUMN yang kemarin kita juga lihat begitu marak terjadi.

Kami berharap betul bahwa rancangan undang-undang ini didalam salah satu kaitannya dengan sistem pendidikan Kewarganegaraan mestinya juga bisa menjangkau ke ranah-ranah tersebut sehingga muatan-muatan cinta tanah air, muatan-muatan cinta produksi dalam negeri, cinta terhadap Indonesia itu juga menjadi bagian penting bagi proses upaya deradikalisasi tersebut, Bapak, Ibu sekalian.

Catatan kami yang ketiga, Bapak, ini terkait dengan isu produktivitas, memang dalam makro pertimbangan, kami melihat, kami harus mendukung ini, ini upaya yang luar biasa, karena Indonesia memang memiliki nol cadangan angkatan kerja di komponen itu. Sementara negara-negara tetangga sudah 3-4 kali lipat daripada komponen militer aktif Korea Selatan itu menjadi yang paling besar saat ini komposisi antara militer aktif dengan cadangannya. Saya kira Indonesia tidak boleh ketinggalan disitu. Memang yang perlu harus kita pertimbangkan adalah bagaimana supaya tidak juga mengganggu produktivitasnya Pak, karena ditingkat Asean, produktivitas tenaga kerja Indonesia memang saat ini, mohon maaf kata, memang masih terendah ketika dikeluarkan 3 bulan angkatan kerja kita untuk ikut didalam sistem kewarganegaraan itu maka produktivitas kami khawatirkan bisa turun juga. Tapi bagaimana ini

bisa kita atur supaya jangan turun dong. Kalau produktivitas kerja maka trade balance kita terganggu, ekspor kita terganggu, kita akan menjadi negara dagang karena lebih banyak impor yang masuk. Ini harus menjadi bagian penting.

Yang keempat Pak, yang terakhir yang perlu kami haturkan dalam skema rancangan undang-undang ini terdapat proses filosofi delegasi negara kepada dunia swasta dalam rangka mengikuti perintah undang-undang ini. Dalam proses delegasi tersebut saya kira mungkin perlu dipikirkan mengenai sistem insentif dan disinsentifnya. Kami lihat di halaman-halaman terakhir itu ancaman pidananya lebih keras daripada upaya merangkul dunia swasta untuk ikut membantu program negara. Mohon dipikirkan kemudian kedepan sehingga proses-proses insentif itu juga dikemukakan disitu sehingga menjadi satu bagian karena menjadi pengusaha di Indonesia itu ancaman pidananya sudah banyak banget Pak, jadi ini ada tambahan satu ancaman pidana. Pidana Lingkungan Hidup, Pidana Ketenagakerjaan, Pidana Pajak, macam-macam itu. Ini nanti akan tambah satu lagi ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak mengamanatkan tidak menjalankan upaya tersebut. Tentu kami dukung, ada pengusaha nakal ditingkat Apindo pun kami tegur tetapi mohon juga diberi porsi yang sedikit lebih fair supaya dunia usaha atau iklim usaha di Indonesia ini bisa tumbuh dengan baik tanpa harus terlalu banyak mengedepankan sistem insentif, disinsentif atau ancaman-ancaman tersebut.

Catatan kami yang terakhir Pak, bagaimana ini di implementasikan kemudian di dunia tenaga kerja yang semi formal, semi informal. Misalnya di NGO, Pak. Non Government Organization LSM yang berjaring dengan luar negeri. Pimpinannya tidak disini, Pak. Bagaimana kemudian sistem pidana yang di implementasikan atau di ancamkan disitu bisa menyangkut kepada rekan-rekan yang jadi dunia luar itu, Pak, karena yang disini semua operatornya mungkin sekelas manajer, mungkin sekelas yang sedikit lebih direktur eksekutif seperti saya. Tapi *the biggest plus for there* Pak, ini mesti kita pikirkan. Ini tidak termasuk dalam ranah-ranah usaha tetapi di RUU Kewirausahaan Nasional, mohon maaf, kemarin juga kami membahas menjadi peserta aktif dalam RUU Kewirausahaan Nasional itu juga kita bahas mengenai itu. *Social entrepreneurship* adalah bagian dari sistem kewirausahaan dan bagian dari sebuah sistem investasi yang harus kita kembangkan. *Social entrepreneurship* ini mekanismenya beda sekali Pak, sedikit cair disitu. Hubungan antara tenaga kerja dengan pemilik kerja itu, ini juga belum ada dirumusan Undang-undang 13 ini. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja yang masuk didalam ranah-ranah *aplication online entrepreneur* seperti Gojek, mereka bukan pegawainya Gojek, Pak. Bukan kan, teman-teman dari Naker, ini kan harus ada didalam ranah ini supaya beliau-beliau ini juga ikut dong upaya bela negara dalam kaitannya dengan RUU ini.

Mohon ijin Bapak, Ibu sekalian itu bisa menjadi bagian yang perlu kita tambah pemikirannya didalam sini mumpung ada teman-teman dari Kementerian Naker apa namanya, ini juga belum ada di rumusan Undang-undang 13. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja yang masuk didalam ranah-ranah *aplication online entrepreneurs* seperti Gojek, mereka bukan pegawainya Gojek, Pak. Bukan kan, teman-teman dari Naker, ini kan harus ada didalam ranah ini supaya beliau-beliau ini juga ikut dong upaya bela negara dalam kaitannya dengan RUU ini. Mohon ijin Bapak, Ibu sekalian, itu bisa menjadi bagian yang perlu kita tambah pemikirannya didalam sini, mumpung ada teman-teman dari Kementerian Naker sehingga seluruh komponen bangsa yang terkait dengan baik dia sudah bekerja atau masuk usia kerja atau masuk di dunia formal kerja atau masuk di dunia informal kerja atau semi, itu bisa terjangkau secara keseluruhannya.

Saya kira itu Bapak, Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Tris, silakan kalau ada tambahan. Sampun Pak? Oke, jadi Bapak-bapak sekalian, dari Kementerian Keuangan, dari PAN, dari Kemenakertrans dan dari Apindo ini sudah ada 4 bagian. Pada prinsipnya setuju Pak ya mendukung. Memang kelihatan ada bagian tertentu di negara kita yang agak terlambat tapi tidak apa-apa ya karena ini negaranya besar. Kalau saya lihat di Malaysia, ada orang rame-rame pake pakaian doreng, saya tanya, siapa itu, itu dari pabrik mana, itu kok ada Letkol, ada mayor. Direktornya dikasih pangkat kolonel itu dibawah staf-stafnya nanti selesai, balik lagi. Kelihatannya bagus juga, cuma memang keuangan negara agak ini Pak, kalau agak kaya kita tidak apa-apalah tapi meskipun demikian, kita akan coba siapkan untuk rencana undang-undang ini.

Terima kasih, Bapak-bapak sekalian. Saya persilakan teman-teman dari Komisi I. Silakan Pak Hari, silakan.

F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM., Ph.D.,D.Sc.):

Terima kasih, Ketua.

Yang kami hormati para narasumber.

Saya pada prinsipnya memang setuju mengenai sistem bela negara ini yang akan dituangkan didalam RUU. Memang kami teringat kami sendiri ya, kami termasuk yang mungkin sudah cukup senior cukup tua disini. Jadi pada tahun-tahun 69-an kalau tidak salah di universitas juga ada yang disebut namanya kewiraan itu dimasukan kedalam satu kurikulum tapi periodenya cukup panjang, pada saat itu adalah 2 tahun. Cuma di pelatihannya hanya setiap Sabtu dan itupun kurikulum yang betul-betul wajib. Malah kalau pelajaran lain kalau ada absen aja itu masih tidak masalah. Tapi kewiraan itu ada batasnya. Sehingga kita tiap Sabtu wajib mengikuti semua hal-hal yang berkaitan dengan bela negara. Jadi termasuk masalah kemiliteran, saya kira manfaatnya waktu itu ada karena mahasiswa itu relatif rata-rata masih muda sehingga semangatnya masih tinggi untuk mengikuti latihan itu semua. Kami juga dilatih dulu waktu di ITB itu dari Rindam kebetulan ya tapi kalau hariannya di kelasnya oleh Mawarman pada saat itu ada yang lebih aktif dan kalau kita mahasiswa masuk kurikulum di Walawa itu tiap Sabtu termasuk latihan-latihan di lapangan. Seperti Jurit malam, montinyering, potong kompas, termasuk juga menembak. Disitu karena secara tidak langsung kita terwujud suatu kerjasama dan rasa kompak dengan teman disitu. Justru kalau kita sekarang ketemu dengan para senior yang sudah pensiun dan apa yang diingat apa, waktu latihan itu. Disitu terjadi terjalin suatu kekompakan atau kekeluargaan. Semua tidak tahu waktu itu dari tahun 68 kalau tidak salah, 67 sudah ada, cuma tahun 72 dihapuskan. Memang mungkin kaitannya saya tidak tahu kaitan dengan anggaran atau apa, pada saat itu dihilangkan. Padahal disitulah sebetulnya terwujud suatu mental-mental bela negara, Pak. Saya juga waktu itu menyesalkan kenapa dihilangkan. Memang ada kasus yang tertembak tapi itu bukan jadi satu hal yang pentinglah, biasa kalau ada kecelakaan 1-2 itu cuma meleset peluru waktu kita runduk segala macam. Kami tadi jadi agak bertentangan kalau dengan Pak siapa tadi, kalau tidak jangan ditekankan masalah kemiliteran. Saya kira kemiliteran itu kalau untuk mahasiswa itu suatu hal yang menyenangkan. Jadi kaya olah raga, sama-sama dan bisa berbaur antara bagian. Sekarang dengan tidak adanya itu, saya lihat agak berpelempang-pelempang begini mahasiswa itu. Tapi kalau pada saat itu sangat sulit Pak, mungkin terutama di Universitas Negeri ya, disini mungkin ada UG sebenarnya ada namanya awal-awal. Cuma mungkin anggarannya itu kembali memang cukup besar tapi manfaatnya itu bagus. Jadi kita secara edukasi pelajaran itu dari Senin sampai Jumat, Sabtu khusus pelajaran kewiraan itu, entah teori, entah praktek dan sampai kita latihan juga di Lembang di Cikole kalau tidak salah Pak ya ada disana. Tapi disitu mewujudkan suatu semangat nasionalisme dari para ex bekas-bekas mantan itu, wajib latih itu setelah jadinya. Sekarang memang kelihatan agak lesu jujur saja. Entah

kemana arahnya. Tapi kalau pada saat itu jiwa kewiraan itulah mungkin yang harus dipegang walaupun dia sarjana ataupun mau doktor mau apa, masih melekat, Pak.

Jadi saya setuju saja itu, mungkin kalau yang sistem yang saya baca kemarin sekilas, itu memang di Amerika sendiri, sistem penerapan itu namanya Wamil itu ada setelah lulus Sarjana, saya juga pernah dipanggil juga waktu itu, untuk ada penggantinya juga. Sebenarnya agak malas, begitu kita lulus karena mereka tidak susah lagi kan untuk di latih Wamil 3 bulan di Pansan kalau tidak salah itu sudah diterapkan kaya di Singapur dan Amerika dan mungkin banyak negara. Saya kira Indonesia juga cukup baik juga kalau hal itu mulai dibangkitkan lagi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, Pak. Saya setuju Pak, sebagai orang angkatan lama gitu Pak Jenderal ya.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Hari Kartana.

Pak Effendi Simbolon, ada? Pak Supiadin, silakan Pak.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, Bapak-bapak yang mewakili kementerian.

Jadi memang Undang-undang RUU PSDN ini memang kita siapkan dalam rangka pertahanan negara secara umum sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara pertahanan negara itu memang secara ekstrim bagaimana kita menyiapkan seluruh sumber daya yang ada baik itu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan itu untuk menghadapi keadaan emergency. Pertahanan negara itu sesuatu yang emergency. Karena begini mungkin sebagai gambaran kita, mengapa sebuah negara membentuk militer. Ini yang harus filosofinya harus kita pahami, banyak yang tidak paham. Jadi militer itu dibentuk untuk menghadapi keadaan krisis, Pak, bukan untuk menghadapi keadaan damai, bukan. Kalau keadaan damai, penegakan hukum, tapi militer itu dibentuk untuk mengadapi krisis. Makanya dalam keadaan damai, dia harus disiapkan. Mulai disiapkan Sumber Daya Manusianya, dicukupi kesejahteraannya, dicukupi latihannya, kemudian dilengkapi perlengkapannya dan macam-macam sehingga pada suatu saat dia menghadapi keadaan krisis, dia tidak mikir lagi yang lain-lain. Yang ada cuma satu, bagaimana negara ini tidak dikuasai oleh negara asing, itu aja. Saya kira pemikiran ini harus ada pada semua warga negara. Jadi jangan sampai kita justru dalam keadaan krisis terjadi pembalikan. Misalnya tanda ekstrim gitu, warga negara yang tidak suka Pemerintah, tiba-tiba begitu negara asing menyerang, dia berpihak kepada negara asing, bukan berpihak kepada negaranya, itu bisa terjadi. Kita ingat jaman Belanda, Pak, bisa terjadi itu.

Nah, supaya ini tidak terjadi memang kita harus menyiapkan dan ini memang tidak mudah menyiapkan ini. Kita sering dengar pendapat wah itu kan bela negara itu kan wajib militer, itu kan melanggar HAM, kita lupa, kita punya HAM tetapi kita juga kita punya kewajiban, kewajiban Hak Asasi maka oleh karena itu saya setuju tadi jadi menyangkut misalnya tenaga-tenaga non formal. Pertama, kita perlu bangun kesadarannya dulu bahwa dia dipanggil itu untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi satu sisi ya aku ngalah dulu lah untuk kepentingan pribadi aku. Kalau kita lihat Pak, Korea, Singapur, Utara dan Selatan Korea itu, Jepang, itu luar biasa. Bapak mungkin bergaul dengan pengusaha-pengusaha Korea Selatan, bagaimana jiwa militansi mereka. Bagaimana disiplin mereka dalam melakukan kerjasama usaha kita, dia tidak sembarangan. Tertanam betul dia disini.

Oleh karena itu saya pikir, ini sudah waktunya kita, sudah 74 tahun dengan penduduk 268 juta, Pak, kita suka tidak suka menurut saya dengan penduduk 268 juta plus sumber daya alam yang luar biasa yang tidak dimiliki maka kita akan menjadi negara besar, Pak. Oleh karena itu pertahanan kita juga harus kita siapkan untuk kepentingan menghadapi kita menjadi negara besar. Oleh karena itu menurut saya partisipasi warga negara ini harus mulai dibangun kesadarannya. Karena menurut saya, semakin sejahtera sebuah negara maka dia akan semakin

butuh rasa aman. Itu sudah hukum alam, Pak. Coba aja kita lihat ambil contoh misalnya, orang-orang yang dibawah jembatan layang segala macam itu, dia tidak butuh rasa aman, Pak, yang dia butuh makan, karena dia tidak punya apa-apa. Coba tiba-tiba dia dapat undian misalnya, dapat rejeki lah kira-kira 200 juta gitu misalnya tidak tahu dari mana, apa yang pertama dia lakukan, pasti dia akan membangun hunian, rumah, tempat dia bisa berlindung. Ketika rumah dia sudah punya maka dia pasti bagaimana mengamankan rumah itu, Pak karena dia takut hartanya terganggu. Kalau kecil, kecil pagarnya, makin besar rumahnya kan dia tidak cukup pagar pendek, dia tinggikan pagarnya, Pak, sudah tidak cukup lagi tinggi, pasang herder, Pak, lama-lama pagarnya 5 meter, malah kalau ada orang masuk dia tidak tau, orang tetangganya tidak ada yang tau. Itu yang namanya tindakan keamanan yang berlebihan. Dia menghilangkan arti keamanan itu sendiri.

Jadi otomatis kalau kita sejahtera pasti butuh rasa aman. Yang kedua, pasti dia menghormati hukum, Pak. Semakin tinggi kesejahteraan dia pasti hormat hukum. Yang ketiga, dia pasti demokrat, dia Pak, pasti karena dia apa, dia akan menghargai pendapat orang lain, pasti dia seorang demokrat artinya paham betul tentang demokrasi kan demokrasi itu menghargai pendapat. Tapi kalau pendidikannya tidak sejahtera boro-boro menghargai orang lain yang penting gue dulu lu entar dulu. Oleh karena itu menurut saya memang ini adalah awal ide yang bagus, kami sudah tampung tadi pendapat Bapak-bapak tentang bagaimana pekerja formal, pekerjaan non formal misalnya NGO, bagaimana pekerja-pekerja misalnya tadi Gojek online itu kita harus pertimbangkan tetapi paling tidak, kita akan bangun kesadaran mereka bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pertahanan negara. Keberadaan mereka itu penting, tadi jangan sampai begitu negara dalam keadaan krisis, justru mereka berbalik. Yang salah siapa, negara juga yang salah karena tidak disiapkan konsep pembinaannya bagaimana supaya kesadaran bela negara itu ada.

Dulu itu ada PPBN, PPBN itu ada satu PPBN dilingkungan pekerjaan, kemudian ada Pendidikan Pengetahuan Bela Negara di lingkungan pemukiman kemudian ada PPBN dilingkungan pendidikan. Saya ingat betul itu tapi begitu reformasi, bubar semua Pak. Termasuk pelajaran Pancasila pun tidak ada di sekolah-sekolah. Jadi sekali lagi saya paham yang Bapak sampaikan, saya sangat paham betul. Jadi itulah yang jadi pertimbangan kami nanti dalam menyempurnakan undang-undang ini. Termasuk misalnya definisi pertahanan negara itu sebuah upaya atau sebuah usaha. Disini disebutkan sebuah usaha itu juga masih tanda tanya Pak, yang benar itu usaha atau upaya pertahanan negara itu. Kalau usaha kan konotasinya kan ekonomi Pak, tapi kalau upaya lebih kepada kebijakan. Ini juga menjadi, saya baca, pertahanan adalah sebuah usaha. Memang dia bisa disebut UPK Pak, kalau istilah kami militer itu UPK (Usaha Pekerjaan dan Kegiatan) tapi itu pembinaan, kalau pembinaan memang, kalau pembinaan itu adalah UPK (Usaha Pekerjaan dan Kegiatan). Jadi banyak hal disini Pak, saya juga misalnya pekerja itu nanti bisa larinya kalau dia tidak masuk misalnya ikut wajib militer karena umurnya masih cukup dia masuk komponen pendukung. Tapi begitu dia merasa ah saya mau pindahlah daftar jadi prajurit misalnya, atau dia sarjana masih memenuhi umurnya dia bisa masuk Papeka (Perwira Prajurit Karir). Gambaran sekarang ini ..(tidak jelas) kepada Bapak, Perwira Prajurit Karir itu berbeda dengan Sepa Wamil Pak, kalau Sepa Wamil dia Sarjana Hukum ikut Papeka Wamil keluarnya tetap dia seorang Sarjana Hukum, dia tidak bisa keluar dari lingkup itu. Tapi kalau sekarang, Pak, dia Sarjana Hukum, ikut Papeka, maka keluar dia lulus berdasarkan hasil psikotesnya, dia tidak mutlak harus kembali Sarjana Hukum. Bisa saja dia langsung jadi Komandan Pleton di Pasukan Infantri dan itu sudah banyak contoh jadi Komandan Kompi. Jadi Sarjana Hukumnya ditinggalkan karena hasil psikologinya, Pak. Ini kemajuan kita dalam perwira pendidikan karir begitu. Kalau dokter, memang cenderung, kalau dokter memang tidak bisa diabaikan lagi dia harus tetapi jadi dokter, tidak mungkin dokter jadi Komandan Kompi.

Jadi banyak kemajuan ini Pak, oleh karena itu memang sekali lagi kami terima kasih dan mungkin buat kita tinggal menyiapkan banyak masukan tadi ini bagaimana karena memang tidak mudah membangun kesadaran orang itu tidak mudah, perlu proses dan mudah-mudahan undang-undang ini menjadi awal untuk kita mewujudkan tanggung jawab seorang warga negara dalam upaya pertahanan negara. Saya kira gitu, Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Supiadin.

Tadi bicara asisten operasi pangliman TNI seperti itu, Pak. Pak ini bagaimana, Pak Effendi, ada? Kita dengar dulu tanggapan dari Bapak-bapak ini seperti apa, kita akan catat, Pak, mungkin akan beberapa kali kita melaksanakan. Silakan dari Kementerian Keuangan dulu, Pak, tanggapan atau jawaban dari pertanyaan apa tadi itu.

STAF AHLI BIDANG BUDAYA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI (DRS. TEGUH WIDJINARKO, MPA.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Sepertinya tadi tanggapan yang disampaikan Bapak-bapak Anggota Dewan lebih banyak ke masalah teknis komponen cadangan. Cuma kembali lagi Pak, memang untuk saya sependapat dengan Bapak Anggota Dewan dan juga Bapak-bapak disini tadi bahwa ketika kita merumuskan komponen cadangan nanti termasuk perencanaannya itu memang perlu kita rumuskan secara hati-hati secara matang Bapak, pertama, tadi memang dari sisi teknis strategi komunikasinya Pak, supaya tidak terkesan militerisasi tadi karena ini sebenarnya yang butuh memang kita kan Negara Republik Indonesia butuh akan ini.

Kemudian yang kedua, ukuran kekuatannya yang akan kita bangun seberapan dan pentahapannya itu yang barangkali nanti perlu kita bicarakan secara hati-hati, Pak karena itu akan berdampak ke anggaran secara langsung. Mungkin dari kami itu dulu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Dari Pak Didik, dari Pak Encep ya tidak ada lagi?

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SDM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (DRS. ARIS WAHYUDI, M.SI.):

Saya mau tanya dulu, ijin Pimpinan.

Pendalaman ke Kementerian Keuangan Pak, ini kan membutuhkan anggaran ya, anggaran cukup lumayan dan itu prosedur-prosedur anggarannya kan karena ini nanti kan dibawah Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu penganggarannya menurut saya memang harus terencana dengan baik, karena kalau tidak, undang-undang ini tidak berjalan gitu loh jadi dia tinggal nama saja Undang-undang PSDN tapi tidak bisa diterapkan. Oleh karena itu kita juga memang menginginkan masukan-masukan ini bagaimana proses penganggarannya kan begitu. Penganggaran misalnya untuk komponen pendukung, untuk komponen cadangan. Sebagai contoh misalnya begini ya komponen pendukung itu, komponen pendukung itu kan dia siap untuk menggandakan kekuatan cadangan, kekuatan cadangan siap untuk menggandakan kekuatan komponen utama. Jadi kalau sebagai gambaran Pak, misalnya contoh begini, perbedaan antara komponen pendukung, cadangan, kalau cadangan itu biasanya jelas. Pertama, purnawirawan, yang kedua, sumber daya yang memang sudah siap digunakan. Salah satu contoh misalnya apa komponen cadangan itu, Pindad Pak, Pindad itu masuk kategorinya komponen cadangan dia. PT PAL jadi dia tidak perlu di rekrut lagi tetapi dia sudah otomatis kan minta kapal, kami minta pesawat, dia sudah siap. Tapi kalau komponen pendukung, belum Pak. Contoh apa misalnya Pabrik Ban, Pabrik Ban itu bisa disebutkan komponen pendukung dia, artinya apa, karena ban yang dia produksi belum ban untuk kepentingan militer. Tetapi bentuk yang dia punya itu kita tinggal pesan kalau gitu untuk kepentingan militer dia bisa dirubah sewaktu-waktu kamu kita minta untuk bangun misalnya membuat ban panser, Pak. Hari ini kita belum punya pabrik yang bisa bikin ban paser, jangankan jauh-jauh itu telapak kakinya tang itu belum bisa bikin, Pak, kita.

Bayangkan itu jadi komponen pendukung itu dia disiapkan untuk membangun, pabrik kaleng misalnya atau pabrik pipa-pipa ledeng, pipa baja itu bisa saja suatu saat kita minta ah kamu robah sekarang bikin laras ini modelnya.

Jadi ini memang memerlukan waktu luar biasa tetapi dari segi penganggaran ini memang mutlak, karena kalau tidak, undang-undang ini tinggal undang-undang saja. Tinggal undang-undang dia tinggal nama saja. Oleh karena itu memang ini khusus anggaran ini memang kita harus memperhatikan yang luar biasa disamping memang undang-undang ini nanti kita akan jabarkan Pak, mana yang memerlukan turunan, mana yang tidak. Ini kan undang-undang ini harus diturunkan nanti turunan-turunannya itu yang kita banyak bahas yang prosedur bagaimana misalnya prosedur teknis tenaga kerja untuk mengikuti misalnya pelatihan yang terkait dengan bela negara berapa lama dia ikut, kemudian selama dia ikut, bagaimana jaminan kesejahteraan keluarganya itu pernah kita lakukan dulu. Dicapai nanggung, selama dia mengikuti latihan, kalau tidak ditanggung terus keluarganya makan apa dirubah. Ini sudah pernah kita lakukan dulu, cadangan dulu.

Jadi sekali lagi terima kasih, saya lebih attensi kepada masalah prosedur keuangannya ini karena itulah kuncinya kalau tidak, nanti kita jalan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan dilanjutkan siapa Pak Teguh ya mungkin ya Pak Teguh ya ini kalau di kita ingat siapa petinju dulu yang menolak Muhamad Ali ya masuk penjara itu kalau tidak salah ya itu nolak bela negara. Pak Teguh *monggo*.

STAF AHLI BIDANG BUDAYA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI (DRS. TEGUH WIDJINARKO, MPA.):

Baik, kami juga sebenarnya memiliki pandangan yang sama dengan Pak Supiadin tadi. Sebenarnya dalam kaitan dengan Pasal 35 ataupun 43 disitu dikatakan bahwa salah satu unsur komponen cadangan adalah ASN. Kemudian dikatakan disitu bahwa tidak kehilangan haknya sebagai pegawai. Dalam kaitan ini tentunya perlu aturan-aturan yang lebih teknis terkait dengan ini. Kami berpikir seperti itu juga Pak, seperti apa yang Bapak pikirkan tadi. Setelah ini barangkali apakah seorang ASN yang sudah nanti ditarik jadi diterima sebagai komponen cadangan apakah dia nanti masih menerima hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN atau seperti apa. karena didalam komponen cadangan pun dibayar kalau tidak salah disebutkan disini dibayar juga, apakah ada doble seperti ini penganggaran seperti ini dan saya kira ini juga perlu dipikirkan dalam aturan-aturan yang lebih teknis lagi.

Dan saya kira dari aspek strategisnya Pak, kalau kami lihat sekarang ini di diklat pelatihan dasar di CPNS itu juga diterapkan bela negara, Pak. Artinya sebenarnya kebutuhan itu sangat mendesak Pak, dengan adanya undang-undang ini Pak, ini saya kira menjadi semacam dukungan yang kuat bagi ASN untuk ikut dalam pelatihan tersebut terutama dalam kaitan dengan materi bela negara. Saya kira itu Pak, saya kira kami mendukung sekali terbitnya undang-undang ini.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Teguh Kementerian Kemenakertran bagi yang sekarang menanggapi, Pak. Silakan Pak, mungkin Pak Aris juga dulu silakan. Lebih banyak lebih bagus.

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SDM KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (DRS. ARIS WAHYUDI, M.SI.):

Terima kasih, Bapak responnya dan mungkin sejalan di kembali lagi mengingat tanpa trans Pak, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Naker, tanpa trans Pak, bukan apa-apa itu juga saudara kita juga, Pak.

Secara umum tadi prinsipnya kami mendukung kemudian bahkan mungkin tadi kaitannya dengan tadi dari Apindo mungkin masalah ketenagakerjaan itu kan masalah hilir masalah akibat. Termasuk juga mungkin anak-anak kita juga posisi saat ini akibat dari sistem-sistem sebelumnya. Dalam hal ini misalnya di pendidikan. Jadi sekaligus juga mungkin menjawab kekhawatiran terkait dengan resources atau anggaran yang besar. Kalau boleh disamping nanti ada khusus model pembinaannya ataupun pendidikan atau pelatihannya itu inklusi dengan sistem pendidikan yang ada. Jadi sejak dini kita tata lagi kurikulum pendidikan kita sehingga nanti kalau sejak dini sudah dikenalkan tentang arti bela negara dan nasionalisme dan lain sebagainya yang terkait dengan pertahanan ataupun keamanan negara. Tadi yang terkait dengan pelaksanaan yang memang intensif itu bisa diminimalisasi dari sisi waktunya, durasinya bisa lebih singkat karena ibaratnya tinggal pemantapan seperti ada model diklat sekarang *on off*, model *on off* itu juga akan meminimalisasi *opportunity loose* kaitannya tadi dengan kekhawatiran dari Apindo misalnya produktivitas. Kalau dimodelkan *on off sandwich* gitu jadi keluar masuk sekaligus betul-betul materi nantinya itu bukan yang eksklusif tapi sekaligus juga nanti bisa mendukung produktivitas karena dengan kami mengalami pelatihan-pelatihan yang terkait dengan laksar dulu itu bukan sekedar fisik kita sehat tapi terbangun korsa, terbangun etos kerja, terbangun solidaritas untuk organisasi. Sehingga modelnya itu lebih di inklusi tidak eksklusif terpisah dari bisnis proses yang ada ditempat masing-masing nanti. Jadi betul-betul walaupun ini bunyinya bela negara tapi nanti hasil outcomenya, mendukung kinerja organisasi, mendukung kinerja perusahaan dan sebagainya dan itu menurut saya tidak ada yang hilang karena pada dasarnya ini adalah investasi. Kalau investasi itu kan ada *opportunity loose* ada kesempatan yang hilang. Tapi setelah mengikuti pelatihan ini nanti yang bersangkutan termasuk perusahaan akan mendapatkan keuntungan nilai tambah, karena akan lebih solid, akan lebih eager dalam melaksanakan tugas dan lain sebagainya termasuk juga dalam hal-hal panggilan untuk kewajiban negara tapi dengan bela negara.

Jadi point kami agar meminimalisasi resources yang besar kaitannya dengan keuangan negara maupun dari *opportunity loose* dari produktivitas itu modelnya di kemas sedemikian sehingga inklusi dan kemudian mungkin juga *on off* model *sandwich* tidak harus blok sehingga nanti misalnya 3 bulan wah kasihan harus menanggung itu. Tapi kalau model *on off* itu pasti akan bisa diminimalisasi *opportunity loose* dan ini diklat-diklat juga sudah dari Kementerian PAN juga sudah semua sudah modelnya *on off* semua. Jadi tetap itu bisa kita lakukan tapi tadi dengan caranya saja strateginya agar tidak terlalu kita tiba-tiba berat. Tapi kalau dari hulunya dari sistem pendidikan sejak dini dari dasar, menengah, kemudian tinggi itu sudah disisipkan materi-materi terkait dengan bela negara nasionalisme, saya rasa pada saatnya nanti dibutuhkan untuk intensif itu dari sisi durasi sudah bisa ditekan dan itu pasti ada efisiensi. Terima kasih sementara.

Teman-teman ada yang menambahkan?

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Aswansyah ya, masih ada tanggapan? Pak Sutarman? Oke. Sekarang kepada kembali ke ini Apindo ini bagaimana menanggapi Pak Supiadin maupun Pak Hari Kartana tadi, mungkin ada masukan, silakan.

DIREKTUR EKSEKUTIF APINDO (DANANG GIRINDRA WARDANA):

Bapak-bapak, jadi pada intinya memang kita ada didalam satu tujuan yang sama, kita mendukung sekali Pak, adanya ini yang kami haturkan bahwa Undang-undang Bela Negara ini, Sumber Daya Nasional ini akan sangat membantu kita terkait dengan produktivitas betul sekali Pak, itu kita juga sangat senang. Hanya mengenai caranya saja nanti kemudian perlu kita atur.

Bapak, Ibu sekalian, saya teringat program yang dicanangkan Bapak Presiden, Pemerintah kita terkait dengan Kartu Pra Kerja, saya membayangkan bahwa implementasi RUU ini sekiranya nanti sudah berbentuk undang-undang dan sudah ada aturan turunannya yang menjadi wajib dilaksanakan maka akan sangat mudah jika itu di injeksi langsung pada awal sebelum angkatan kerja kita masuk kerja, karena ini tidak akan mengganggu produktivitas, justru malah membantu kami di dunia usaha merekrut teman-teman yang sudah memiliki, sudah mengikuti upaya bela negara itu. Ini tahapan pertama yang memungkinkan kita bisa aplikasikan.

Dengan cara itupun Bapak kalau kita melihat data bahwa angka bukaan lapangan kerja kita tahun 2018 2,1 juta lapangan kerja yang dibuka dan terserap untuk masuk dunia kerja formal. Dengan pemikiran yang sama seandainya 2019 ini tidak ada pertumbuhan ekonomi diatas 5,2 atau 5,1% maka angka itu kurang lebih stagnan 2,1 atau mungkin lebih sedikit karena bentuk investasi yang masuk lebih hightech daripada mes production. Sehingga kalau kita membayangkan tahun 2020 atau 2021 seandainya ini sudah bisa di implementasikan maka itu akan langsung terpikirkan oleh kita dengan bonus demografi yang ada maka angkatan kerja yang bisa kita pikirkan untuk masuk kedalam angkatan pertama di Akademi Bela Negara atau apa namanya nanti Pak, itu kurang lebih diangkat sekitar 3 jutaan, Pak. Ini angka yang besar yang harus benar-benar kita kelola dengan baik. Saya khawatir teman-teman di Kementerian Keuangan lebih pusing daripada kita yang disini. Bagaimana memproduksi prosesnya.

Tahap berikutnya Bapak, Ibu sekalian tentu harus masuk ke pekerja yang kalangan existing yang sudah ada disitu yang saya kira usianya seperti yang digariskan disini 24 sampai 35 itu bagus banget Pak, itulah angka-angka usia produktif yang kiranya benar-benar secara kedewasaan juga masih sedikit labil, masih gampang terpengaruh oleh isu-isu radikalisasi atau isu-isu parsial Sara itu ya, itu penting sekali untuk kita bisa masuk ke ranah tersebut.

Saya kira terakhir Bapak, kami haturkan, kami sangat mendukung dan kami sangat berkehendak untuk bisa memberikan sumbangan masukan terkait data-data profile pekerja, bagaimana implemetasi pendidikan di *its are* di dunia kerja kita yang kebetulan memang relatif Anggota Apindo itu korporasi besar-besar nasional dan multinasional sehingga kita pasti bisa memberikan sumbangsih yang cukup baik dalam hal ini.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Silakan kalau masih ada Pak Trisno. Ada cukup? Munkgin bagi Anggota lagi, Pak Supiadin ya ini gurunya dulu, Pak.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):

Yang pertama, kami minta Pak, dari Bapak-bapak yang hadir sekarang ini tolong dibuatkan secara tertulis, tanggapan Bapak. Itu bahan kami karena ini kami segera setelah semua RDP, RDPU ini kami akan membuat DIM tandingan yang dari Pemerintah. Ini Pemerintah kan sudah memberikan DIM kepada kami, Daftar Isian Masalah tentu kami masing-masing fraksi akan membuat DIM tandingan artinya kalau itu cocok ya cocok. Kalau kira-kira itu belum, ya kita bikin DIM dari masing-masing fraksi, itu yang pertama. Jadi kami mohon berikan masukan kepada kami secara detail karena Bapak sudah hadir, lebih bagus kalau dilengkapi dengan bahan tertulis supaya kami gampang nanti masuk ke Komisi I dibagikan kepada seluruh fraksi.

Yang kedua, memang bela negara ini ada yang jangka pendek, jangka panjang, Pak. Saya paham tadi dari Bapak, yang jangka panjang itu nanti itu yang kita bilang dimulai dari sekolah kan kita sudah hilang ini Pak, PPBN itu hilang di lembaga pendidikan karena dianggap

produk masa lalu yang tidak berguna. Padahal ini penting sekali. Misalnya bagaimana bentuk pendidikan bela negara dilingkungan SD misalnya tentu dia akan beda literasinya dengan di SMP, SMA. Contoh misalnya atau di Rumah Tangga, PPBN dilingkungan keluarga, misalnya. Kalau seorang anak dia sudah patuh pada ibunya, pada Bapaknyalah itu bela negara yang paling mendasar. Sehingga suatu saat dia dapat perintah dari negara, oh ya saya sama Bapak sudah patuh, sekarang negara mau memerintahkan saya, berarti saya harus lebih patuh lagi kepada negara. Itu contoh, dilingkungan SMP bagaimana, dilingkungan pekerjaan bagaimana. Itu saya kira jangka panjang yang dimaksud tadi, kita akan bikin konsep itu sehingga nanti keluarannya satu bahwa bangsa ini memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, kapan saja termasuk misalnya ketika dia berlalu lintas Pak, tidak ada lagi masyarakat kita yang PKL atau trotoar dipakai untuk jalan, tidak ada lagi. Tidak ada lagi masyarakat kita yang motor dia masuk ke tengah-tengah ke kanan ya sudah jalan motor ya jalan motor. Jalan mobil sudah jalan mobil kan begitu, jalan orang ya jalan orang tidak boleh jalan orang ditabrak pakai motor jalan mobil sehingga kita bingung berlalu lintas itu. Ini mobil kita mau kedepan ada motor di depan, kita ke kanan ada motor di kanan, ke kiri ada motor di kiri, dibelakang apalagi banyak sekali yang ngantri. Ini saya kira pelan-pelan saya kira itu, ini tugas kami Pak jadi wakil rakyat bagaimana membuat konsep ini tetapi sekali lagi kita ingin masukan-masukan yang detail supaya kita bersama fraksi lain, ini karena targetnya tahun anggaran ini harus selesai, Pak. Kami target disini sebelum 1 Oktober ini sudah selesai, Pak. Kita ingin sebelum 1 Oktober sudah selesai dan hasilnya itu Paripurnalah kita ingin ada, karena ini memang secara umum kita sudah sepakat, konsep dari Pemerintah juga sudah, kebetulan saya juga terlibat beberapa kali sebagai narasumber dalam RUU ini pembahasan RUU ini ke daerah-daerah sosialisasi jadi kita berharap sebenarnya sudah tinggal hampir-hampir ketok palu gitu Pak, tapi tetap kita menghargai proses demokrasi, kita ingin pendapat dari seluruh fraksi.

Jadi sekali lagi kita ingin masukan detail dari Bapak-bapak supaya kami tidak multitafsir lagi tadi konsep dari Apindo juga bagus. Kita tidak terpikirkan ada yang pegawai yang NGO, pegawai-pegawai yang online itu tidak terpikir oleh kita, kita tahunya karyawan, sama saja perlakuannya padahal mereka punya latar belakang yang berbeda. Saya kira ini Pimpinan, masukan, terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Supiadin.

Teman-teman, Bapak-bapak dari Kemenerian Keuangan, Kementerian PAN kemudian Kemanakertrans, dan Apindo ya.

Apakah ada masukan-masukan lain? Saya rasa ini cukup. Kalau bisa Pak, kita minta tadi semacam ada yang tertulis, tidak usah tebal-tebal-lah sedikit saja tapi ada pegangan kita. Mungkin dalam satu minggu ini kita bisa terima Pak, dikirim aja. Jadi dengan maksud dengan data yang tertulis itu kita bisa mengkonfirmasi bagaimana dengan Komisi I nanti karena kita akan melibatkan Menhan, akan melibatkan Menteri HAM nanti itu bisa nyambung. Jadi kami sangat mengharapkan seperti yang disampaikan Pak Supiadin tadi, ada bentuk tertulis walaupun 2 lembar, 3 lembar tapi kita punya pegangan untuk bisa menyamakan jam terbangnya gitu loh Pak, kira-kira. Ini bagus sekali jadi kita ada bahan nanti.

Kemungkinan juga kita akan bertemu lagi mungkin, mungkin kalau ada waktu nanti kita undang lagi jadi Bapak-bapak ini tidak apa-apa karena kita RUU ini kadang-kadang selesainya bisa cepat, bisa bertahun-tahun Pak, kadang-kadang sampai 10 tahun tidak beres-beres. Ini mulai masuk DPR ini sampai dia keluar lagi masuk yang kedua lagi baru selesai di ujung, ada yang begitu, Pak. Tapi ya seperti itu. Ini sekali lagi kami terima kasih karena Bapak-bapak, mudah-mudahan yang datang ini memberikan pencerahan juga kepada kita. Cuma ini kita sedikit, ini sudah ujung-ujung ini Pak, beberapa minggu lagi mungkin tutup. Jadi yang Anggota lama tutup, nanti Anggota pilih baru mungkin akan dilantik. Ini ujung-ujung ini tapi aneh yang akan dilantik malah banyak yang tidak datang, kita yang ada sekarang banyak yang tidak dilantik ini, Pak. Ini herannya begitu ini memang kadang-kadang begitu. Dengan semangat kita agak

hebatlah Pak Effendi Simbolon, Pak Hari Kartana, Pak Supiadin, ini mudah-mudahan mencerminkan ya. Kalau Pak Effendi Simbolon kelihatannya masih terus Pak, karena beliau ketua suku dibidang apa gitu jadi masih terus.

Ini Bapak sekalian ya, saya rasa kita tidak membuat draft kesimpulan karena ini hanya menampung masukan. Mudah-mudahan nanti bahan Bapak yang tertulis ini tidak usah tiap orang satu tidak, setiap LK saja kementerian atau lembaga saja, satu saja Pak Danang satu, Pak Teguh satu, Pak Didik satu walaupun berdua, Pak Aris mungkin satu saja tidak usah dua kan kasih anak buah sebentar. Besok jadi. Silakan Pak Effendi Simbolon.

F-PDIP (DR. EFFENDI MS SIMBOLON, MIPOL.):

Pak Pimpinan, karena ini saya diminta untuk membuat paper seperti resume atau apalah namanya makalah begitu, saya ingin memberi muatan aja Pak, karena draft ini sebenarnya kenapa tidak menarik dan tidak memaksa karena tidak ada secara tegas menyatakan musuhnya siapa, Pak. Negara ini tidak pernah jantan jujur menyatakan siapa sih musuh kita. Kalau di undang-undang di Israel, di Australi, di Korea, di Iran, semua negara itu menyatakan musuh utara kita ini, musuh selatan kita ini, musuh barat kita ini, gitu Pak. Kita selalu mengatakan, kita tidak akan ada musuhlah, tidak ada ya sudah kalau gitu bubarin saja tentaranya. Bubarin saja jadi Satpol PP saja semua itu hantamin aja rakyat terus kedalam. Jadi kenapa dulu Bung Karno dalam tanda petik mencari musuh, itu adalah mencari konsolidasi, Pak. Dia momentum konsolidasi hanya bisa dapat kalau kita punya musuh bersama. Itu juga politik, Pak. Politik kita hanya politik urusan bagi-bagi kursi, urusan-urusan yang *tetek bengek*. Ini kenapa, ini dulu Pak, TAP MPR kita VI dan VII, mengamanatkan sampai komponen cadangan itu di amanatkan. Tapi sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada satupun yang jadi, Pak. Bahkan ada Undang-undang Kamnas itu induknya dari seluruh Undang-undang Pertahanan Keamanan tidak juga dibuat. Urusannya tarik menarik antara Polisi-Tentara, Polisi-Tentara siapa yang jaga K besar, K kecil. Kita 2004 sudah heboh itu Pak, tapi sampai sekarang 15 tahun.

Jadi kalau tadi ini mohon maaf, karena Bapaklah nanti katakanlah Kementerian-kementerian teknis yang langsung berkaitan dengan sumber daya manusia yang tadi dalam tanda petik sebagai potensi kekuatan cadangan kita itu akan sulit sekali Bapak akan menggerakannya. Tapi akan jauh sebaliknya dengan mudah kita meletakkan dasar-dasar ini. Kalau dia sadar ancamannya siapa, Pak. Musuh dia itu siapa. Malaysia itu menempatkan musuh kita, dia itu kita, Pak. Malaysia itu jelas Pak, Singapur itu apalagi, lebih jelas lagi. Karena 2 menit terbang sudah keluar dari batas wilayahnya, Pak. Kita tidak punya musuh semua pejabat kita tidak ada musuh kita ya buat apa ada ini. Ini menghambur-hamburkan uang saja 60 juta orang kita didik bela negara cuma nyetak kaos, nyetak pamflet, nyetak ini, bikin seminar. Kerjanya formalitas saja.

Jadi seperti tadi Bapak dari Kemnaker tadi itu dijamin Pak Domo kan Pak, ini Pak, orang ini bukan cara militer, militer itu juga cara memaksa orang untuk melakukan disiplin, Pak. Munculnya kesadaran untuk disiplin itu tidak serta merta bisa secara natural Pak, maka militer itu memaksa. Orang tadi tidak biasa bangun pagi, bangun pagi dia, itu dipaksa, Pak. 4 tahun kawacandra dimuka, tahun ke-5 dia sudah menjadi tentara yang siap melaksanakan tugasnya, Pak. Jadi tolong jangan diartikan oh ini militeristik oh bukan, Pak, tapi seluruh dunia, universal Bapak lihat TNI-nya kita, kita itu jumlahnya tidak sampai 400.000 dengan catatan latihan itu sekali dua tahun, Pak. Ini sengaja saya sampaikan ke Bapak agar Bapak nanti buat makalah siapa ancaman yang menurut sektor Bapak. Harusnya negara yang mendefinisikannya Pak, apakah ini ya mari disepakati, Pak. Ini bukankah ancaman Papua ini, ancaman Pak. Kita anggap oh ini urusan hanya kata-kata yang disampaikan kata-kata yang tidak sopan, siapa bilang. Nah sekecil itu urusannya, Pak. Ini bukan urusan Persija lawan Persib, Pak. Bukan, Pak, mereka mau merdeka kok. Ngapain mereka ikut kita Pak, dia juga kalau Bekasi pun suruh merdeka pasti merdeka Pak, Karawang itu mau merdeka mereka. Apalagi Papua baru tahun 60an gabung saja kita.

Jadi ini tolong harusnya rencana yang sudah sangat mulia ini sudah mendefinisikan bentuk ancaman kita baru nanti kita lihat betul kah New Zealand, Australia terganggu dengan undang-undang ini. Mereka menempatkan serangan dari utara adalah Indonesia, Pak. Makanya

dia tempatkan 3.500 marinir Amerika di Darwin, Pak. Demikian juga China merasa terganggu dia tempatkan di Papua, di Hanoa itu Amerika taro. Sudah jelas Pak, ini kan urusan hegemoni dunia ini kan jelas, Pak. Bukan lagi sistem penjajahan model VOC jelas kok, agresi kok.

Jadi maksud saya karena ini Bapak diminta oleh Pimpinan, oleh Ketua tadi, saya mohon jangan kita seperti ngobrol-ngobrol seolah-olah *take for granted* tidak akan ada ancaman, siapa bilang, Pak. Kita besok bangun pagi, negara kita ini sudah negara orang, Pak. 74 tahun kita belum merasakan merdeka yang sebenarnya. 350 tahun loh Pak, 100 tahun oleh VOC selebihnya oleh company, Pak. Jelas kok ada Belanda disana, ada sekutu disana, ada Jepang, sekarang masuk lagi China sekarang. Harusnya kita bicara serius, bukan bicara sepertinya oh kamu Apindo ketempatan, kasih mana Ketua datang hadir kesini kan, mana Menteri Tenaga Kerjamu hadir disini dong. Mohon maaf, saya bukan merendahkan Bapak, ini persoalan negara kok terancam kok siapa yang tidak tergiru dari Sabang sampai Merauke. Kata orang-orang Papua eh ngapain kamu men....saya uang-uang saya kau, pergi kau katanya. Dia dengan satu saja Pak, itu yang sekarang kita sering heboh-hebohkan itu Freeport dia punya 17 lokasi yang sama seperti itu, Pak. Besok-besok bangsa Papua itu jauh lebih hebat dari bangsa-bangsa yang di dunia ini, Pak.

Sekarang Bapak tahu, pilot-pilot di Israel itu banyak orang Papua, ini mohon maaf *off the record*, doktor-doktor di Harvard semua orang-orang Papua, Pak. Kita masih asik aja bangga kesana kemari. Jangan lecehkan mereka, ancamankah itu? Ancaman Pak, kenapa tidak ditempatkan disini. Oh nanti rahasia terbuka, terbuka saja, terjadi ada *cross estimation*. Sudah era terbuka kok sekarang, Pak. Itu maksud saya Bapak stakeholder yang kami minta masukan, Bapak saja tidak menyadari itu, kami juga tidak menyadari itu, Pemerintah apalagi. Datang kemarin Menhan kesini, sepertinya ini hanya rancangan undang-undang urusan pabrik kecap ini Pak, ini urusan jiwa raga kita Pak, tanah air kita, Pak. Bapak lihat bagaimana penderitaan Palestina, Pak. Tanah leluhur nenek moyangnya dia terusir dari sana, mungkin kita akan begitu, siapa bilang tidak mungkin. Siapa yang tidak tergiur Pak lihat sumber daya alam kita, Pak.

Kalau saya, serius, mari kita duduk, jangan ada urusan oh ini karena periode ini harus selesai, masa ini mau diselesaikan dengan sebulan. Pak mau diselesaikan sebulan, emang ini Perda urusan bagaimana orang jualan lapak PKL. Ringan sekali persoalannya, ini persoalan mendasar, Pak, bagaimana memobilisasi kekuatan pertahanan kita dengan melakukan konsolidasi di sumber daya manusia, sumber daya alam. Sudahkan kita petakan, Pak. Bagaimana kita karut marutnya membuat perencanaan tata ruang kita. Disitu pelabuhan padahal disitu adalah pelabuhan TNI Angkatan Laut oh tidak ini ekonomis, kamu yang pindah. Lihat Makasar itu Pak itu dibentuk oleh pembuat perencanaan dari jaman Belanda, sudah dirancang, Pak. Kita tiba-tiba mau pindah-pindah suka-suka saja, sudah dihitung semua, itu Pak. Makanya saya mohon dengan segala hormat kalau mau pindah Ibu Kota sekalian saja pindah ke Papua kita. Kalau hanya pindah ke Kalimantan itu cari-cari masalah, Pak.

Jadi saya mohon maaf, saya ke Ketua, ini stakeholder, pasti kalau kita buka pasti mereka adalah para komponen yang potensial juga memberikan masukan tapi jelas Bapak juga harus didepan meminta Pak ancaman kita ini, Pak. Sebut saja, bahwa Bapak nanti beragam silakan, nanti kami kumpul disini. Silakan masing-masing fraksi memasukan dalam DIM-nya. Kami juga memasukan dari Fraksi PDI Perjuangan tapi yang saya sangat sayangkan DIM dari Pemerintah tidak menempatkan Pak, ancaman utara, ancaman selatan, ancaman barat, timur. Pak, dengan kekuatan 0,7% dari PDB pertahanan negara kita, Pak, ini karena Tuhan aja baik sama kita, Pak, hanya karena Tuhan baik sama Bangsa Indonesia, tidak ada kekuatannya, Pak. Coba Bapak buat tabulasi setarakan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, kita perang paling lama 3 hari, Pak. Mau berkelanjutan gerilya, siapa lagi yang kuat, Pak mana ada lagi mental-mental manusia Indonesia yang kuat bergerilya, Pak. Satu hari saja kita 9 jam padam sudah marah-marah semua, kuat kita satu bulan tanpa listrik.

Saya bicara serius, Pak. Lebih baik kita pahit-pahit, kita dewasa bukan anak-anak kita ini lembaga DPR, ini bukan bicara iseng-iseng, ini bicara sangat serius, Pak, makanya saya dari tadi diam Pak Jenderal, ini kok begini ya. Kemarin saya contact Pak Menhan, Pak kenapa anda mengajukan begini. Dangkal sekali dokumen negara mengenai yang prinsip. Begini kah cara pandang Pemerintah terhadap ancaman nyata, ancaman potensial, ancaman yang apakah ideologi, apakah perekonomian, jelas dong. Di bagi ke anak SD itu, eh kalian terancam loh lihat ke

Israel itu Pak, tentara terbesar di dunia itu Israel Pak karena seluruh penduduknya adalah tentara, Pak. Makanya seluruh negara Arab tidak bisa melawan dia, negara Arab mana mau berperang dia, dia kaya raya. Akankah seperti itu kita alami, Pak maka undang-undang ini menurut hemat saya sangat baik tapi dengan catatan kita juga harus terbuka jujur disini. Bagaimana anda mengkonsolidasi 120 berapa tadi yang Bapak sampaikan tenaga angkatan kerja kita, 136 juta, bagaimana anda mengkonsolidasi itu. Oh tingkat capaian kita kata Kemhan 100 juta. 100 juta cuma Bapak kumpulin di hotel habis itu Indonesia..habis itu makan, habis itu sayembara kuis, kasih kaos, apakah itu mereka sudah siap untuk bela negara? Tidak, Pak.

Singapur itu 2 tahun Pak, mendidik anak-anak kacamata, rambutnya culun-culun tapi penguasaan teknologinya Pak, kita perang bukan lagi model-model kaya begini, Pak. Ini sudah perang cyber, Pak. Masih konvensional keroyokan gitu tarkam, Pak, betul Pak? Saya ingin sharing kita ini Pak, saya ingin mengajak Bapak nih bukan Bapak sebagai pejabat-pejabat di instansi tapi sebagai warga bangsa. Bapak, saya, Ibu, Pimpinan semua punya anak, punya keturunan, masiakah akan eksis Indonesia? Ini salah satu yang bisa memberi dukungan untuk kepastian itu, Pak. Maka tolong Bapak kasih masukan yang excellent Pak, jangan hanya sekedar kaya tadi semuanya. Ya mohon maaf Pak, kami tidak ada papernya, di mindset Bapak berarti memang tidak ada, tidak salah Bapak itu, salah saya, Pak, salah Pemerintah, karena tidak menyadarkan bangsanya, rakyatnya bahwa kalian juga terancam. Lihat Korea Utara itu Pak, Bapak tahu tentara Korea Selatan, makan minum 1 menit, Pak. Lihat tentara Indonesia setengah jam main handphone Pak, dimana Mas, dimana lo, makan, karena tidak ada ancaman, Pak. Tentara Korea Selatan makan 1 menit, Pak. Benar Pak, lihat langkahnya Korea Utara itu, tidak ada keringetan, Pak. Kita cia-cia handphone jatuh. Tentara Korea Utara mana ada pegang handphone. Tentara China mana ada pegang handphone, hidupnya memang militeristik dia. Jelas, kita terancam. Akankah kita begitu, Bapak jangan katakan itu militeristik, Pak, ini negara sudah sangat homo lupus, Pak. Kapan Bapak, terlenta, hilang.

Itu Pimpinan, saya kira Pak Jenderal ini 2 Jenderal, dalam hatinya pasti sama cuma mungkin tidak seperti saya mau menyampaikan apa adanya, sama dalam hatinya. Ini juga senior saja ini 2 periode mantan bupati. Makanya saya mohon Bapak-bapak, pasti Bapak buat didalam ada diskusi internal dulu baru kasih masukan ke kami, Pak.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP.):

Terima kasih, Pak Effendi Simbolon. Beliau termasuk senior disini, Pak. Jadi ini betul apa yang disampaikan beliau. Saya baru saja pulang dari Iran setelah dari China ke Iran lihat Uighur di China, di Sindiang lihat Iran. Kita mengira agak susah, ternyata mudah disana, Pak. Kita mengira orang Iran keras ternyata lunak, yang keras malah Arab. Jadi tentara Iran itu salah satu tentara yang disegani oleh Amerika karena dia latihannya bagus, latihan terus menerus. Drone Amerika, kita datang, baru ditembak jatuh satu oleh Iran. Jadi ini pemulaan-pemulaan Pak, saya rasa bagus kita seperti berdiskusi gini mudah-mudahan ada manfaatnya karena setiap negara memang lain-lain caranya, Pak. Terserah, yang penting negaranya bisa aman. Kalau tidak lihat-lihatlah model Papua itu, kalau Papua merdeka, mungkin tempat Pak Effendi itu merdeka juga pak, di Medan sana merdeka juga itu. Itu Riau merdeka juga semua merdeka. Oleh karenanya ini sebetulnya sudah mendesak Pak, bagaimana komponen cadangan ini disiapkan jadi bagaimana sumber daya nasional ini kita atur sebaik-baiknya. Ini memang kita banyak Pak, didalam DPR saja sekarang masih ada 10 fraksi, 10 partai. Jadi yang pendapat sama itu jarang, yang berbedabeda itu banyak. Itulah demokrasi namanya.

Mungkin ini saja Pak, sekarang sudah jam 4 pas ya kita mungkin hanya 1 jam sedikit. Saya rasa ini bermanfaat kita tunggu dari Bapak dalam minggu ini ada sedikit tertulis Pak, bahan kita, kita sama-sama belajar, kami belajar, Bapak juga belajar, ini untuk negara kita. Mudah-mudahan Kementerian Keuangan tidak pelit-pelit bangetlah Pak ini untuk negara ini. Ini agak sulit, biasanya kuncinya itu biasanya di Menteri Keuangan, ini yang agak repot. Gimana, mereka juga pegang uang itu tidak bisa semena-mena lepas-lepas begitu saja ya bangkrut nanti kan padahal negara banyak yang akan dibangun.

Ya terima kasih, Pak ya atas kehadiran Bapak, Ibu sekalian, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan kita akan jumpa lagi. Kalau yang belum sempat minum, silakan minum Pak. Dengan demikian RDP, Rapat Dengar Pendapat dan Dengar Pendapat Umum antara Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Kemanakertrans, Apindo dengan Komisi I kita nyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.59 WIB)

Jakarta, 20 Agustus 2019
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si.
NIP. 19710106 199003 2 001